Agustus, 2025, Volume 7 Nomor 2
E-ISSN 2656-1026

KEPEMIMPINAN HUKUM DAN ETIKA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PUBLIK

Ana Suheri
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya
Email : heripalangka88@gmail.com

Abstrak

Dalam konteks pemerintahan kontemporer, kepemimpinan hukum dan etika memiliki peran krusial dalam proses pengambilan keputusan publik. Keputusan yang diambil oleh pemimpin masyarakat harus mematuhi hukum yang berlaku dan mencerminkan prinsip etika yang tinggi. jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara kepemimpinan hukum dan etika dalam konteks pengambilan keputusan publik, dengan menekankan pentingnya transparansi , akuntabilitas , dan partisipasi publik, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena kepemimpinan hukum dan etika dalam pengambilan keputusan publik di Kota Palangka Raya. Hasil penelitian Hukum dan etika kepemimpinan dalam pengambilan keputusan publik di Kota Palangka Raya merupakan aspek krusial untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Walaupun terdapat tantangan seperti korupsi dan minimnya partisipasi masyarakat, terdapat juga peluang yang signifikan untuk memperbaiki keadaan ini. Oleh karena itu, para pemimpin di Palangka Raya harus berkomitmen untuk mengutamakan prinsip-prinsip hukum dan etika dalam setiap keputusan yang diambil.

Kata kunci : Kepemimpinan Hukum, Etika Pemgambilan Keputusan, Publik

Pendahuluan

Pengambilan keputusan publik adalah proses krusial dalam pemerintahan, terutama di kota-kota besar seperti Palangka Raya. Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan sumber daya, penyampaian layanan publik, dan penegakan hukum. Dalam konteks ini, kepemimpinan hukum dan etika memiliki peran yang sangat krusial. Keunggulan kepemimpinan mengharuskan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dengan tetap mempertimbangkan dimensi etika dalam setiap keputusan yang diambil. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang diterapkan tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan transparan.

Masalah ini terpecahkan dari berbagai isu yang dihadapi oleh pemerintah daerah, termasuk korupsi, otoritas kekuasaan, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah termasuk dalam daftar provinsi dengan tingkat korupsi yang signifikan, mengindikasikan perlunya

reformasi dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan (KPK, 2022).

Apalagi, survei yang surveidilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah Palangka Raya masih rendah, dengan hanya 45 % responden yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah Palangka Raya masih rendah, dengan hanya 45 % responden yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah (LSI, 2023).

Hukum dan etika kepemimpinan menunjukkan bahwa terdapat berbagai teori dan konsep yang dapat digunakan untuk menganalisis fenomena ini. Menurut ke Utara (1990), lembaga yang efektif sangat penting untuk mendorong kepemimpinan (1990), efektif. Lembaga yang efektif sangat penting untuk membina kepemimpinan yang efektif. Dalam Dalam konteks Palangka Raya, institusi hukum yang kokoh dan etika yang tinggi dalam kepemimpinan dapat mendorong pengambilan keputusan yang lebih optimal. Selain itu, penelitian oleh Treviño dkk. (2006) menunjukkan bahwa etika dalam kepemimpinan secara langsung mempengaruhi perilaku organisasi dan keputusan yang diambil oleh pemimpin.

Kepemimpinan hukum mengacu pada kemampuan pemimpin untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan hukum yang berlaku. krusial dalam konteks pemerintahan daerah, termasuk di kota Palangka Raya. Berdasarkan keUndang-Undang Nomor 23 Undang-Undang Nomor 232014 tentang Pemerintahan Daerah, pemimpin daerah harus mampu mengelola sumber daya secara efektif dan melayani masyarakat secara adil dan transparan (Kementerian Dalam Negeri, 2021).Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemimpin daerah harus mengelola sumber daya secara efektif dan melayani masyarakat secara adil dan transparan (Kementerian Dalam Negeri, 2021).

Etika dalam kepemimpinan meliputi norma dan nilai yang menjadi acuan bagi pemimpin dalam pengambilan keputusan. Meliputi integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Menurut penelitian Kurniawan (2022), pemimpin yang beretika cenderung memperoleh kepercayaan masyarakat, yang berimplikasi pada peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks konteksPalangka dari, kepemimpinan yang berlandaskan hukum dan etika sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Palangka Raya, kepemimpinan yang berlandaskan hukum dan etika sangat penting untuk membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kepemimpinan hukum dan etika mempengaruhi pengambilan keputusan publik di Palangka Raya. penelitian akan mengeksplorasiini beberapa faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan publik, termasukyang legalpengambilan keputusan konteks, termasuk konteks hukum, norma sosial, dan etika pemimpin individu. Norma sosial, dan etika pemimpin individu . Dengan memahami hubungan ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan publik di Palangka Raya dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena kepemimpinan hukum dan etika dalam pengambilan keputusan publik di Kota Palangka Raya. Penelitian ini akan mencakup analisis dokumen, wawancara mendalam, dan observasi partisipatif untuk

memperoleh pemahaman komprehensif mengenai praktik kepemimpinan yang ada.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan beberapa pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah daerah wawancara dengan beberapa pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah daerah, anggota legislatif, dan perwakilan masyarakat sipil, anggota legislatif, dan perwakilan masyarakat sipil. Data yang diperoleh dari wawancara ini kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, di mana peneliti mengidentifikasi tema -tema utama yang muncul dari tanggapan responden. Sejumlah 30 responden dipilih secara purposif, yaitu individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait pengambilan keputusan publik. Data yang diperoleh dari wawancara ini kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, di mana peneliti mengidentifikasi tema -tema utama yang muncul dari tanggapan responden.

Selain wawancara, analisis dokumen juga dilakukan terhadap kebijakan publik yang diterapkan di Kota Palangka Raya. Selain wawancara, dilakukan juga analisis dokumen terhadap kebijakan publik yang diterapkan di Kota Palangka Raya. Dokumen yang dianalisis meliputi Peraturan Daerah, laporan tahunan pemerintah, dan dokumen perencanaan pembangunan laporan, dan dokumen perencanaan pembangunan. Melalui metode ini, peneliti dapat memahami konteks hukum yang mengatur pengambilan keputusan serta etika yang diharapkan dalam pelaksanaannya. Data sekunder ini diperkuat oleh statistik relevan, termasuk data demografi dan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Observasi partisipatif dilakukan melalui keterlibatan dalam berbagai forum diskusi publik dan pertemuan pemerintahan. Ini memberikan wawasan langsung wawasantentang bagaimana keputusan dibuat dan bagaimana etika ditegakkan sepanjang proses. Tentang bagaimana keputusan dibuat dan bagaimana etika ditegakkan sepanjang proses. Peneliti mengamati interaksi antara pemimpin dan masyarakat, serta penerapan nilai-nilai hukum dan etika dalam praktik sehari-hari. Pengamatan juga membantu peneliti dalam mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam menerapkan kepemimpinan yang efektif di sektor publik.

Melalui kombinasi metode ini, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai kepemimpinan hukum dan etika dalam pengambilan keputusan publik di Kota Palangka Raya. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pengambil kebijakan dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih transparan dan akuntabel. masa depan.

Hasil dan Pembahasan

Kota Palangka Raya, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, menghadapi sejumlah tantangan dalam pengambilan keputusan publik yang melibatkan dimensi hukum dan etika. Dalam Dalam konteks ini, kepemimpinan hukum dan etika sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Menurut untuk data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah, pada Biro Pusat 2022, jumlah penduduk Palangka Raya mencapai sekitar 250.000 jiwa, mencakup beragam latar

belakang sosial dan ekonomi (BPS, 2022) Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah, pada tahun 2022, jumlah penduduk Palangka Raya mencapai sekitar 250.000 jiwa, mencakup beragam latar belakang sosial dan ekonomi (BPS, 2022). Hal ini mengharuskan para pemimpin daerah para pemimpinmempertimbangkan kepentingan semua kelompok masyarakat dalam setiap keputusan yang diambil mempertimbangkan kepentingan semua kelompok masyarakat dalam setiap keputusan yang dibuat.

Pengambilan keputusan publik yang efektif memerlukan kerangka hukum yang kokoh dan standar etika yang tinggi. Dalam Dalam konteks Palangka Raya, kepemimpinan yang efektif harus mampu mengintegrasikan hukum dan etika ke dalam setiap kebijakan yang dihasilkan. Contohnya, dalam pengelolaan sumber daya alam, pemimpin harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial terhadap masyarakat setempat. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepemimpinan etis dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Smith, 2021).

Selain itu, signifikansi kepemimpinan hukum dan etika juga diwujudkan dalam upaya pemerintah kota untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Melalui partisipasi publik, masyarakat dapat memberikan kontribusi yang signifikan dan membantu merumuskan kebijakan yang lebih inklusif. Menurut penelitian Universitas PGRI Palangka Raya, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik di kota ini tergolong rendah, dengan hanya 30% responden yang merasa terlibat dalam proses tersebut (Universitas PGRI Palangka Raya, 2023). Oleh karena itu, diperlukan upaya tambahan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik.

A. Kerangka Hukum dan Etika dalam Pengambilan Keputusan

Kerangka hukum Palangka Raya mencakup banyak peraturan daerah yang mengatur administrasi dan proses pengambilan keputusan publik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berfungsi sebagai landasan hukum utama untuk mengatur kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik. Lebih lanjut, Peraturan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun Palangka tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi acuan dalam perumusan kebijakan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa , 2022) Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berfungsi sebagai acuan dalam perumusan kebijakan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2022)

Namun, meskipun terdapat kerangka hukum yang tegas, tantangan dalam pelaksanaannya masih banyak dijumpai. Contoh kasus yang relevan adalah proyek pembangunan infrastruktur yang sering terhambat oleh masalah perizinan dan konflik kepentingan. Menurut untuk sebuah laporanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK), korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di

Palangka Raya merupakan masalah signifikan yang mengancam integritas pengambilan keputusan publik (KPK 2023) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Palangka Raya merupakan masalah signifikan yang mengancam integritas pengambilan keputusan publik (KPK, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang kuat, hukumnya implementasinya, penerapannya sering kali menyimpang dari prinsip-prinsip etika yang diantisipasi, sering menyimpang dari prinsip etika yang diantisipasi.

Dalam konteks etika, pemimpin masyarakat di Palangka Raya diharapkan dapat mengedepankan nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas PGRI Palangka Raya menunjukkan bahwa masyarakat cenderung tidak percaya kepada pemerintah daerah ketika mereka merasa keputusan yang diambil tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi publik. Oleh karena itu, penting bagi pemimpin untuk mengembangkan budaya etika yang kokoh dalam setiap aspek pengambilan keputusan.

Penerapan pelaksanaan prinsip etika dalam pengambilan keputusan publik juga dapat diamati dalam cara Pemerintah Kota Palangka Raya menangani masalah sosial seperti kemiskinan dan ketidakadilan sosial .dari Prinsip etika dalam pengambilan keputusan publik juga dapat diamati dalam cara pemerintah kota Palangka Raya menangani masalah sosial seperti kemiskinan dan ketidakadilan sosial . Dalam laporan tahunan, Dinas Sosial Kota Palangka Raya mencatat bahwa tingkat kemiskinan di kota ini mencapai 10,5% pada tahun 2022, yang mengindikasikan perlunya kebijakan yang lebih efektif dan adil (Dinas Sosial, 2022). Pemimpin yang etis harus dapat merumuskan kebijakan yang tidak hanya mengatasi permasalahan kemiskinan, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan.

B. Konteks Sosial dan Budaya di Palangka Raya

Kota Palangka Raya memiliki latar belakang sosial dan budaya yang khas, yang mempengaruhi dinamika kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Palangka Raya, ibu kota Kalimantan Tengah berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan memiliki keragaman budaya yang kaya, termasuk kelompok etnis Dayak, Jawa, dan Batak. Penelitian Supriyanto (2023) menunjukkan bahwa keberagaman tersebut seringkali menimbulkan tantangan dalam pengambilan keputusan, khususnya menyangkut representasi dan partisipasi masyarakat bahwa keberagaman ini sering kali menimbulkan tantangan dalam pengambilan keputusan, khususnya mengenai representasi dan partisipasi masyarakat.

Contoh konkretnya adalah dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan sumber daya alam. Banyak masyarakat adat masyarakat merasa terpinggirkan dalam proses tersebut. Menurut untuk laporan oleh Masyarakat Adat Nusantara (AMAN, 2022), kurangnya partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan pemanfaatan hutan di Palangka Raya mengakibatkan konflik dan ketidakpuasan yang meluas . Oleh karena itu, pemimpin di Palangka Raya harus dapat mengatasi perbedaan ini melalui pendekatan yang

inklusif dan berlandaskan hukum.

C. Keterlibatan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik adalah elemen krusial dalam demokrasi. Di Palangka Raya, terdapat berbagai mekanisme yang memungkinkan partisipasi masyarakat, seperti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan forum diskusi publik. Menurut data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (2023), sekitar 70% warga Palangka Raya berpartisipasi dalam proses musrenbang, yang mencerminkan tingginya antusiasme masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan.

Namun, meskipun terdapat mekanisme tersebut, tantangan tetap ada dalam memastikan bahwa suara masyarakat benar-benar terdengar. Penelitian oleh Rahman (2022) menunjukkan bahwa keputusan seringkali tidak mencerminkankali aspirasi mencerminkan aspirasi masyarakat, melainkan kepentingan segelintir orang dari masyarakat, melainkan kepentingan beberapa orang terpilih. Hal ini menunjukkan perlunya para pemimpin untuk lebih proaktif dalam memastikan partisipasi masyarakat yang tulus dan efektif.

Kesimpulan dan Saran

Hukum dan etika kepemimpinan dalam pengambilan keputusan publik di Kota Palangka Raya merupakan aspek krusial untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Walaupun terdapat tantangan seperti korupsi dan minimnya partisipasi masyarakat, terdapat juga peluang yang signifikan untuk memperbaiki keadaan ini. Oleh karena itu, para pemimpin di Palangka Raya harus berkomitmen untuk mengutamakan prinsip-prinsip hukum dan etika dalam setiap keputusan yang diambil.

Rekomendasi untuk memperbaiki kebijakan hukum dan etika di Palangka Raya meliputi peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pemanfaatan teknologi untuk transparansi, serta penyediaan pendidikan dan pelatihan bagi para pemimpin daerah. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan Palangka Raya dapat menjadi teladan dalam penerapan kepemimpinan yang efektif di Indonesia.

Referensi

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangka Raya. (2023). Statistik Daerah Palangka Raya 2023. Palangka Raya: BPS.

Kurniawan, A. (2022). Etika Kepemimpinan dan Kepercayaan Publik. *Jurnal Ilmu Sosial*, 15(2), 45-60.

Mardani, A., & Supriyadi, S. (2022). Etika dan Kepemimpinan dalam Pengambilan Keputusan Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 45-60.

North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance.* Cambridge University Press.

Sari, R. (2023). Analisis Kebijakan Publik di Kota Palangka Raya: Tantangan dan Harapan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(2), 123-140.

Smith, J. (2021). *Ethics in Public Leadership: A Comparative Study.* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Suharto, B. (2023). *Kolaborasi dalam Pengambilan Keputusan Publik: Studi Kasus di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.

Supriyanto, R. (2023). Budaya Lokal dan Pengambilan Keputusan Publik. *Jurnal Budaya dan Masyarakat*, 10(1), 23-37.

Treviño, L. K., Hartman, L. P., & Brown, M. (2006). *Moral Person and Moral Manager: How Executives Develop a Reputation for Ethical Leadership.* California Management Review, 49(4), 128-142.

Universitas Gadjah Mada (UGM). (2023). *Penggunaan Teknologi dalam Partisipasi Masyarakat: Studi Kasus di Indonesia*.

Williams, R. (2022). *Inclusive Decision-Making in Local Government: Lessons from Indonesia*. Jakarta: Penerbit Lembaga Penelitian.